

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah berkontribusi sangat besar bagi perekonomian Indonesia karena jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan UMKM berkontribusi pada 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Besarnya kontribusi UMKM ini juga dibarengi dengan permasalahan besar yang mengancam keberlanjutan UMKM. Permasalahan yang dihadapi UMKM berdasarkan *MSMEs Empowerment Report 2022* berkaitan dengan pemasaran produk, pemenuhan bahan baku, keuangan, dan adopsi digital (Mawarsari, 2023). Survei Bank Indonesia terbaru pada *MSMEs Empowerment Report 2022* menunjukkan 69,5% UMKM belum menerima pinjaman. Tantangan ini bersumber dari rendahnya inklusi keuangan UMKM. Pada saat yang sama, peminjam (bank dan *multifinance*) juga menghadapi beberapa tantangan untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Selain itu, transaksi manual seringkali tidak memiliki pencatatan yang intensif serta membuat laporan keuangan tidak lengkap. Padahal laporan pembukuan yang tertata membantu pengusaha untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih komprehensif lagi, misalnya untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Mawarsari, 2023). Permasalahan ini menyebabkan keberlanjutan bisnis UMKM tidak dapat dicapai secara optimal.

UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, namun pengelolaan UMKM tidak mudah. Saat ini UMKM mempunyai permasalahan terkait keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha menjadi salah satu kondisi ketika pelaku usaha dapat meningkatkan pencapaian keuntungan usaha secara terus menerus serta mampu dalam mempertahankan operasional usaha (Zumaroh, 2021). Keberlanjutan usaha (*business sustainability*) UMKM terdiri dari indikator keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan Bathaei & Štreimikienė (2023)

Keberlanjutan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya dapat mendukung sebuah bisnis untuk mempertahankan keberlanjutannya, dimana pembahasan sumber daya ini sesuai dengan *Resource-Based Theory*. *Resource-Based Theory* merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh (Wernerfelt, 1984) yang menguraikan sebuah bisnis akan semakin unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja yang baik dengan cara memiliki, menguasai, dan memanfaatkan aset-aset strategis yang penting (aset berwujud dan tidak berwujud). *Resource-Based Theory* menyiratkan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan mengelola sumber daya menjadi lebih berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat diganti akan mencapai kinerja yang bertumbuh dan memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Barney, 1991). Sumber daya yang dimiliki mendukung perusahaan untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya (Kurniawati, 2022).

Sumber daya perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori yakni sumber daya modal fisik, sumber daya modal manusia, dan sumber daya modal

organisasi. Sumber daya modal fisik termasuk teknologi yang digunakan oleh perusahaan, pabrik, peralatan, lokasi bisnis dan akses ke bahan baku. Sumber daya modal manusia termasuk pengalaman, kemampuan, dan kecerdasan yang ada di dalam perusahaan. Sumber daya modal organisasi meliputi struktur pelaporan, perencanaan, pengawasan baik di dalam maupun dalam hubungannya dengan lingkungan di luar perusahaan (Barney, 1991). Sehingga berdasarkan *Resource-Based Theory*, keberlanjutan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diantaranya adalah literasi keuangan dan inklusi keuangan (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021) yang merupakan bagian dari sumber daya modal manusia, kemudian teknologi keuangan (Nantungga (2022) yang merupakan bagian dari sumber daya modal fisik. Hasil pembangunan dan pemvisualisasian jaringan bibliometrik menggunakan aplikasi *VOSviewer* dengan *input database* artikel terindeks Scopus yang diperoleh dari aplikasi *Publish or Perish* menunjukkan beberapa variabel yang memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan adalah literasi keuangan, kesiapan teknologi, inklusi keuangan, pemasaran, dan manajemen modal (Lampiran 1). Literasi keuangan, teknologi keuangan, dan inklusi keuangan dipilih untuk menciptakan model penelitian mediasi. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2017). Literasi keuangan merupakan segala hal yang berfokus pada skill, ilmu pengetahuan dan pemahaman konsep pada pembelanjaan, penyimpanan, investasi dan peminjaman uang dengan segala cara dengan tujuan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang (Matemane, 2018). Teknologi keuangan atau *fintech* adalah kombinasi dari sistem

dan teknologi layanan keuangan yang memberikan akses kemudahan dalam memproses transaksi keuangan bagi masyarakat saat menggunakan aplikasi keuangan tersebut (Ningsih et al., 2022).

Faktor pertama yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM berdasarkan *Resource-Based Theory* adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2017). Pemerintah Indonesia sudah mulai memberikan perhatian terhadap inklusi keuangan Masyarakat. Pemerintah Indonesia sudah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yakni dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif, sekaligus telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Pemerintah menjamin akses layanan keuangan formal dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dewasa Indonesia. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR yang merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi, diberikan kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Susanto, 2019). Survei Bank Indonesia terbaru pada *MSMEs Empowerment Report 2022* menunjukkan 69,5% UMKM belum menerima pinjaman. Hal ini menjadi salah satu indikasi inklusi keuangan UMKM masih rendah.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian

Nurohman et al. (2021) dan Nantungga (2022) menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha, sedangkan penelitian Hilmawati & Kusumaningtias (2021) inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Permasalahan yang terjadi dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM sangat perlu untuk dilakukan.

Temuan empiris dari penelitian terdahulu mayoritas menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha dan inklusi keuangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Keberlanjutan usaha menjadi salah satu kondisi ketika pelaku usaha dapat meningkatkan pencapaian keuntungan usaha secara terus menerus serta mampu dalam mempertahankan operasional usaha (Zumaroh, 2021). Keberlangsungan usaha adalah kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan tingkat produksinya yang dibantu oleh alam dalam kurun waktu jangka panjang, bukan hanya sementara. Sehingga sumber daya merupakan faktor sangat penting untuk mendukung keberlanjutan usaha. Pengaruh sumber daya terhadap keberlanjutan usaha didasari oleh *Resource-Based Theory*. *Resource-Based Theory* menyiratkan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan mengelola sumber daya menjadi lebih berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat diganti akan mencapai kinerja yang bertumbuh dan memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Barney, 1991). Sumber daya yang dimiliki mendukung perusahaan untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya (Kurniawati, 2022). Literasi keuangan menjadi bagian dari sumber daya modal manusia. Literasi keuangan merupakan segala hal yang berfokus pada skill, ilmu pengetahuan dan pemahaman konsep

pada pembelanjaan, penyimpanan, investasi dan peminjaman uang dengan segala cara dengan tujuan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang (Matemane, 2018). UMKM yang memiliki literasi keuangan yang baik akan dapat mencapai tujuannya, memiliki orientasi pengembangan usaha dan mampu survive dalam kondisi ekonomi yang sulit (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2017). UMKM dapat memanfaatkan ketersediaan akses keuangan formal dengan dukungan kondisi pribadi pemilik UMKM berupa pengetahuan dan keterampilan terkait keuangan yang disebut dengan literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2017). Pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan didasari oleh *Theory of Planned Behaviour*. *Theory of Planned Behaviour* adalah teori yang menyatakan jika dalam seseorang berperilaku pasti didasari oleh keyakinan atas informasi yang di peroleh (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen (2005) dalam *Theory of Planned Behaviour* menunjukkan terdapat beberapa pertimbangan yang melatar belakangi perilaku seseorang yakni *personality*, *social* dan *information*. Pengambilan keputusan individu dalam *theory of planned behavior* merepresentasikan inklusi keuangan, karena inklusi keuangan berhubungan dengan ketersediaan akses serta pengambilan keputusan individu untuk mengakses produk dan layanan keuangan (Kerthayasa &

Darmayanti, 2023). Faktor *personality* dan *information* memiliki relevansi dalam memberikan penjelasan pada literasi keuangan dikarenakan pada *personality* merepresentasikan sikap dan perilaku keuangan, serta *information* merepresentasikan pengetahuan keuangan (Kerthayasa & Darmayanti, 2023). Literasi keuangan masyarakat Bali Tahun 2022 masih rendah yakni 57,66% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan dan keberlanjutan UMKM masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian Simanjuntak (2019), Adetunji & David-West (2019), Zulkieflimansyah et al., (2020), Irman et al. (2021), Nantunga (2022), dan Akande et al. (2023) menunjukkan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan, sedangkan penelitian Natalia et al. (2020) literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Penelitian Idawati & Pratama (2020), Hilmawati & Kusumaningtias (2021), Ayu & Dewi (2021), Burchi et al. (2021), Nantunga (2022), Zaniarti et al. (2022), Fitri et al. (2022), Raharjo et al. (2023) dan Anggara & Purnamawati (2023) menunjukkan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha, sedangkan penelitian Kaban & Safitry (2020) menunjukkan literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Permasalahan yang terjadi dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian terkait pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan dan keberlanjutan UMKM sangat perlu untuk dilakukan.

Faktor kedua yang mempengaruhi keberlanjutan dan inklusi keuangan adalah teknologi keuangan. Teknologi keuangan atau *fintech* adalah kombinasi

dari sistem dan teknologi layanan keuangan yang memberikan akses kemudahan dalam memproses transaksi keuangan bagi masyarakat saat menggunakan aplikasi keuangan tersebut (Ningsih et al., 2022). *Financial technology* menjadi bagian dari sumber daya modal fisik jika dikaitkan dengan *Resource-Based Theory*. *Resource-Based Theory* menyiratkan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan mengelola sumber daya menjadi lebih berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat diganti akan mencapai kinerja yang bertumbuh dan memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Barney, 1991). Sumber daya yang dimiliki mendukung perusahaan untuk mempertahankan keberlanjutan (Kurniawati, 2022). Pengaruh teknologi keuangan terhadap inklusi keuangan didasari oleh *Theory of Planned Behaviour*. *Theory of Planned Behaviour* merupakan teori yang menyatakan jika dalam seseorang berperilaku pasti didasari oleh keyakinan atas informasi yang di peroleh (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen (2005), dalam *Theory of Planned Behaviour* menunjukkan terdapat beberapa pertimbangan yang melatar belakangi perilaku seseorang yakni *personality, social* dan *information*. Pengambilan keputusan individu dalam *Theory of Planned Behavior* merepresentasikan inklusi keuangan, karena inklusi keuangan berhubungan dengan ketersediaan akses serta pengambilan keputusan individu untuk mengakses produk dan layanan keuangan (Kerthayasa & Darmayanti, 2023). Faktor *information* memiliki relevansi dalam memberikan penjelasan *financial technology* dikarenakan *information* merepresentasikan pemahaman dan kecakapan dalam penggunaan *financial technology* (Kerthayasa & Darmayanti, 2023). Adopsi digital termasuk penggunaan teknologi keuangan UMKM masih rendah sesuai dengan *MSMEs Empowerment Report 2022* (Mawarsari, 2023).

Data dari Kominfo menunjukkan saat ini 68% UMKM yang belum memanfaatkan ruang digital untuk pengembangan ekonomi mereka (Yusuf, 2022).

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh teknologi keuangan terhadap inklusi keuangan dan keberlanjutan UMKM masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian Simanjuntak (2019), Irman et al. (2021), dan Nantunga (2022) menunjukkan teknologi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan, sedangkan penelitian Sari & Kautsar (2020) menunjukkan teknologi keuangan tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Penelitian Nurohman et al. (2021) dan Nantungan (2022) menunjukkan teknologi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha, sedangkan penelitian Purbadharmaja & Widanta (2023) menunjukkan teknologi keuangan tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Permasalahan yang terjadi dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian terkait pengaruh teknologi keuangan terhadap inklusi keuangan dan keberlanjutan UMKM sangat perlu untuk dilakukan.

Keberlanjutan usaha (*business sustainability*) UMKM diukur dengan indikator keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan (Bathaei & Štreimikienė, 2023). Keberlanjutan ekonomi mencakup biaya dan manfaat finansial, keberlanjutan sosial berhubungan pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan sosial budaya dan spiritual masyarakat secara adil, dan terakhir keberlanjutan lingkungan berhubungan dengan pengalokasian dana untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Keberlanjutan ekonomi berhubungan dengan biaya dan manfaat keuangan, dimana salah satu biaya dalam sebuah bisnis adalah biaya utang. Biaya utang merupakan tingkat bunga yang

dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman yaitu kreditor sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan. Kemampuan pembayaran biaya utang mempengaruhi *Non-Performing Loan* (NPL). NPL menggambarkan kondisi di mana debitur tidak dapat membayar angsuran yang sedang berlangsung secara tepat waktu. NPL kredit nasional pada Desember 2021 sebesar 3%, Desember 2022 sebesar 2,44%, dan Desember 2023 sebesar 2,19% (Katadata, 2024). NPL UMKM pada salah satu Provinsi di Indonesia yakni Provinsi Bali sebagian besar lebih tinggi dari NPL nasional. Secara lebih menghusus, NPL UMKM di Kabupaten Buleleng secara konsisten selama tiga tahun terakhir lebih tinggi dari NPL nasional sesuai data pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Rata-rata *Non-Performing Loan* (NPL) Kredit UMKM Provinsi Bali Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Kabupaten Buleleng	4,14%	4,44%	3,19%
Kabupaten Badung	3,52%	4,37%	1,88%
Kabupaten Klungkung	4,76%	4,29%	3,35%
Kota Denpasar	3,20%	3,48%	2,87%
Kabupaten Jembrana	2,09%	3,28%	1,23%
Kabupaten Karangasem	3,86%	3,10%	3,67%
Kabupaten Tabanan	1,66%	1,84%	1,77%
Kabupaten Bangli	1,29%	1,17%	1,13%
Kabupaten Gianyar	1,21%	0,95%	1,28%

Sumber: Bank Indonesia (2022); Bank Indonesia (2023); Bank Indonesia (2024).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu UMKM dengan NPL diatas NPL nasional dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2021 NPL UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 4,14% sedangkan NPL nasional sebesar 3%. Tahun 2022 NPL UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 4,44% sedangkan NPL nasional sebesar 2,44%. Tahun 2023 NPL UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 3,19% sedangkan NPL nasional sebesar 2,19%. NPL

UMKM di Kabupaten Buleleng juga selalu termasuk kedalam tiga urutan tertinggi di Provinsi Bali. Tekanan pendapatan pada UMKM, terutama yang menggunakan pinjaman bank untuk mendanai operasionalnya, akan mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya karena rendahnya pendapatan sehingga UMKM menjadi tidak mampu untuk mengembalikan modal usahanya. Penurunan pendapatan mempengaruhi kemampuan untuk membayar kembali pinjaman dan mengurangi kelayakan kredit bank dan lembaga keuangan (Sintha et al., 2023). Hal ini menjadi salah satu indikasi keberlanjutan UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami permasalahan.

UMKM di Kabupaten Buleleng berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terbagi menjadi tiga kelompok yakni sektor, klasifikasi, dan transformasi. Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng berdasarkan klasifikasi disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Berdasarkan Klasifikasi

No	Sektor	Jumlah		
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Perdagangan	43.239	3.843	961
2	Industri Pertanian	7.309	650	162
3	Aneka Jasa	3.379	300	75
4	Industri non Pertanian	5.805	516	129
Jumlah		59.732	5.309	1.327

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali (2023)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng tahun 2023 paling banyak berupa usaha mikro yakni mencapai 59.732 unit, usaha kecil 5.309 unit, dan usaha menengah 1.327 unit. Pertimbangan pada klasifikasi UMKM yang paling relevan dengan topik penelitian menyebabkan usaha menengah dipilih dan dikaji lebih mendalam.

Keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng mengalami permasalahan. Hasil survey awal terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng menggunakan indikator dari Naufal & Purwanto (2022) yakni adanya perubahan aset pada setiap periode, adanya peningkatan jumlah kas dan omset pada setiap periode, adanya perubahan harga jual pada setiap periode, adanya perubahan tingkat jumlah pelanggan pada setiap periode, dan adanya perubahan jumlah lokasi usaha pada 25 Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1.3 Indek Keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng

No.	Indikator	Total Skor				Jumlah*	Indeks**
		1	2	3	4		
1.	Adanya perubahan aset pada setiap periode	3	18	4	0	51	12,75
2.	Adanya peningkatan jumlah kas dan omset pada setiap periode	6	16	2	1	48	12
3.	Adanya perubahan harga jual pada setiap periode	7	17	1	0	44	11
4.	Adanya perubahan tingkat jumlah pelanggan pada setiap periode	8	15	2	0	44	11
5.	Adanya perubahan jumlah lokasi usaha	16	9	0	0	34	8,5
Jumlah							55,05
Rata-rata***							11,05 (Rendah)

Sumber: Data primer diolah (2024), Lampiran 3.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa indeks rata-rata untuk variabel keberlanjutan usaha adalah 11,05 dan termasuk dalam kategori rendah. Artinya menurut responden, mereka memiliki keberlanjutan usaha yang rendah.

Inklusi keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng masih rendah. Hasil survey awal terhadap inklusi keuangan Usaha Menengah di Kabupaten

Buleleng menggunakan indikator dari Hilmawati & Kusumaningtias (2021) yakni akses, penggunaan, dan kualitas menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1.4 Indek Inklusi Keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng

No.	Indikator	Total Skor				Jumlah*	Indeks**
		1	2	3	4		
1.	Akses	6	16	3	0	47	11,75
2.	Penggunaan	6	17	1	1	47	11,75
3.	Kualitas	9	13	3	0	44	11
Jumlah							34,5
Rata-rata***							11,5 (Rendah)

Sumber: Data primer diolah (2024), Lampiran 3.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa indeks rata-rata untuk variabel inklusi keuangan adalah 11,5 dan termasuk dalam kategori rendah. Artinya menurut responden, mereka memiliki inklusi keuangan yang rendah.

Literasi keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng masih rendah. Hasil survey awal terhadap literasi keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng menggunakan indikator dari Pirari (2020) yakni pengetahuan umum pengelolaan keuangan, pengetahuan tabungan dan pinjaman, pengetahuan asuransi, dan pengetahuan investasi menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1.5 Indek Literasi Keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng

No.	Indikator	Total Skor				Jumlah*	Indeks**
		1	2	3	4		
1.	Pengetahuan umum pengelolaan keuangan	6	18	1	0	45	11,25
2.	Pengetahuan tabungan dan pinjaman	7	16	2	0	45	11,25
3.	Pengetahuan asuransi	12	11	1	1	41	10,25

	asuransi						
4.	Pengetahuan investasi	3	18	4	0	51	12,75
Jumlah							45,5
Rata-rata***							11,375 (Rendah)

Sumber: Data primer diolah (2024), Lampiran 3.

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa indeks rata-rata untuk variabel literasi keuangan adalah 11,375 dan termasuk dalam kategori rendah. Artinya menurut responden, mereka memiliki literasi keuangan yang rendah.

Pemanfaatan teknologi keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng juga masih rendah. Hasil survey awal terhadap teknologi keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng menggunakan indikator dari Rosmalita & Nadirsyah (2020) yakni tingkat kecepatan, tingkat keamanan, tingkat pemanfaatan teknologi, tingkat efisiensi biaya, dan tingkat kualitas hasil dari laporan keuangan menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1.6 Indek Teknologi Keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng

No.	Indikator	Total Skor				Jumlah*	Indeks**
		1	2	3	4		
1.	Tingkat kecepatan	4	17	4	0	50	12,5
2.	Tingkat keamanan	4	15	6	0	52	13
3.	Tingkat pemanfaatan teknologi	5	17	3	0	48	12
4.	Tingkat efisiensi biaya	7	14	3	1	48	12
5.	Tingkat kualitas hasil dari laporan keuangan	5	18	2	0	47	11,75
Jumlah							61,25
Rata-rata***							12,25 (Rendah)

Sumber: Data primer diolah (2024), Lampiran 3.

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa indeks rata-rata untuk variabel teknologi keuangan adalah 12,25 dan termasuk dalam kategori rendah. Artinya menurut responden, penggunaan teknologi keuangan mereka rendah.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian Purbadharmaja & Widanta (2023) tentang pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. Peneliti menambahkan dua variabel baru yakni literasi keuangan dan teknologi keuangan serta menyusun ulang model penelitian dengan menggunakan literasi keuangan dan teknologi keuangan sebagai variabel bebas, inklusi keuangan sebagai variabel intervening, dan keberlanjutan sebagai variabel terikat. Model penelitian yang melibatkan literasi keuangan dan teknologi keuangan sebagai variabel bebas, inklusi keuangan sebagai variabel intervening, dan keberlanjutan sebagai variabel terikat menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan pada UMKM di Provinsi Bali, sedangkan penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kabupaten Buleleng sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, untuk memperoleh bukti empiris pengaruh literasi keuangan dan teknologi keuangan terhadap inklusi keuangan sekaligus dampaknya pada keberlanjutan usaha, penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Mediasi Inklusi Keuangan pada Pengaruh Literasi Keuangan dan Teknologi Keuangan Terhadap Keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keberlanjutan UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami permasalahan yang ditunjukkan dengan rendahnya kemampuan dalam mengembalikan modal awal

sehingga *Non-Performing Loan* (NPL) kredit UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki posisi tertinggi di Provinsi Bali.

2. Survei Bank Indonesia terbaru pada *MSMEs Empowerment Report 2022* menunjukkan 69,5% UMKM belum menerima pinjaman. Hal ini menjadi salah satu indikasi inklusi keuangan UMKM masih rendah. Inklusi keuangan yang rendah ini akan menyebabkan UMKM kesulitan mengakses lembaga keuangan untuk memperoleh pinjaman.
3. Literasi keuangan masyarakat Bali Tahun 2022 masih rendah yakni hanya 57,66%. Literasi keuangan yang rendah menyebabkan UMKM tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik.
4. Teknologi keuangan mempunyai peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan keberlanjutan bisnis UMKM, namun data dari Kominfo menunjukkan saat ini 68% UMKM yang belum memanfaatkan ruang digital untuk pengembangan ekonomi mereka.
5. Hasil survei awal menunjukkan literasi keuangan, teknologi keuangan, inklusi keuangan, dan keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng berada pada kategori rendah.

1.3. Pembatasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah penelitian bertujuan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah. Subjek penelitian difokuskan pada Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng dan objek penelitian difokuskan pada keberlanjutan usaha, inklusi keuangan, literasi keuangan, dan teknologi keuangan.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah teknologi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah teknologi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng?
5. Apakah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng?
6. Apakah inklusi keuangan memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng?
7. Apakah inklusi keuangan memediasi pengaruh teknologi keuangan terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh teknologi keuangan terhadap inklusi keuangan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng.

3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh teknologi keuangan terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng.
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng.
6. Untuk memberikan bukti empiris peran mediasi inklusi keuangan pada pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng.
7. Untuk memberikan bukti empiris peran mediasi inklusi keuangan pada pengaruh teknologi keuangan terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui peran mediasi inklusi keuangan pada pengaruh literasi keuangan dan teknologi keuangan terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran mediasi inklusi keuangan pada pengaruh literasi keuangan dan teknologi keuangan terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan keberlanjutan Usaha Menengah.

b. Bagi Pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi bersaing untuk mempertahankan atau meningkatkan inklusi keuangan dan keberlanjutan usaha.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam akuntansi keberlanjutan dan manajemen strategik.

1.7. Penjelasan Istilah

Seluruh penjelasan istilah dalam penelitian ini akan dijelaskan secara konseptual maupun operasional pada bagian kajian pustaka.

1.8. Asumsi Penelitian

Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah adanya peran mediasi inklusi keuangan pada pengaruh literasi keuangan dan teknologi keuangan terhadap keberlanjutan Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng. Asumsi ini didasari oleh hasil penelitian terdahulu yang relevan.

1.9. Rencana Publikasi

Rencana publikasi hasil penelitian ini adalah pada jurnal nasional bereputasi terindeks Sinta.

